

SKRIPSI

**KOORDINASI ANTAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
KUBU RAYA**



Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kajian Manajemen Publik

Oleh:

**Jessee Omega Sabattilat
NIM. E1011161070**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

SKRIPSI

**KOORDINASI ANTAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
KUBU RAYA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Oleh:

Jessee Omega Sabattilat
NIM. E1011161070

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KOORDINASI ANTAR DINAS TERKAIT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
KUBU RAYA**

Disusun Oleh:

**Jessee Omega Sabattilat
NIM. E1011161070**

Telah disetujui oleh :

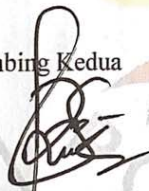
Pembimbing Utama



Dr. Dedi Kusnadi, M.Si
NIP. 1961 052619 8703 1006

Tanggal : 1 Oktober 2024

Pembimbing Kedua



Rasidar, SE, M.Si
NIP. 1968 082520 0701 2001

Tanggal : 30 oktober 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KOORDINASI ANTAR DINAS TERKAIT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
KUBU RAYA**

Oleh:
Jessee Omega Sabattilat
NIM. E1011161070

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juli 2024
Waktu : 09.00 – Selesai.
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

Tim Penguji

Ketua,



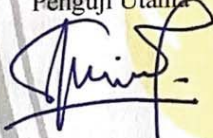
Dr. Dedi Kusnadi, M.Si
NIP. 1961052619870310061

Sekretaris



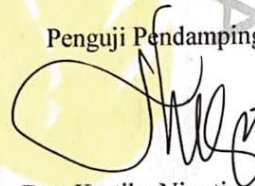
Rasidar, SE, M.Si
NIP. 196808252007012001

Penguji Utama



Dr. Sri Maryuni, M.Si
NIP. 196503021990022001

Penguji Pendamping



Dra. Kartika Ningtias, M.Si
NIP. 196605251994032001

DISAHKAN OLEH:
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Jessee Omega Sabattilat Judul: Koordinasi Antar Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya. **Skripsi: Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2024.**

Tujuan penelitian adalah ingin menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori faktor yang mempengaruhi koordinasi yang efektif oleh Hasibuan 2006:88 yang terdiri dari 1) Kesatuan Tindakan 2) Komunikasi 3) Pembagian Kerja 4) Disiplin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Antar Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya belum maksimal. Faktor Kesatuan tindakan meliputi ketidakjelasan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan protokol dapat menyebabkan kebingungan tentang langkah-langkah yang harus diambil. Faktor Komunikasi meliputi sistem komunikasi yang tidak terintegrasi atau tidak memadai dapat menyebabkan informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu atau tidak akurat. Faktor Pembagian kerja meliputi kurangnya kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Faktor Disiplin, meliputi penegakan disiplin yang tidak konsisten atau tidak tegas yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur. Adapun saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu memaksimalkan Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

Kata kunci: Koordinasi, Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

ABSTRACT

Jessee Omega Sabatilat Title: Coordination Between the Environmental Service and the Regional Disaster Management Agency in Handling Forest and Land Fire Disasters in Kubu Raya Regency. Thesis: Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak 2024..

The purpose of this study is to describe and analyze the factors that influence the implementation of coordination between the Environmental Service and the Regional Disaster Management Agency in handling forest and land fires in Kubu Raya Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. This study uses the theory of factors that influence effective coordination by Hasibuan 2006:88 which consists of 1) Unity of Action 2) Communication 3) Division of Work 4) Discipline. The results of this study indicate that Coordination between the Environmental Service and the Regional Disaster Management Agency in Handling Forest and Land Fires in Kubu Raya Regency has not been maximized. Unity of action factors include the lack of clarity in standard operating procedures (SOPs) and protocols can cause confusion about the steps to be taken. Communication factors include an unintegrated or inadequate communication system that can cause information not to be delivered on time or inaccurately. Division of work factors include lack of clarity in the division of responsibilities can cause inconsistencies in the implementation of tasks. Discipline factors include inconsistent or indecisive enforcement of discipline that can result in violations of standard operating procedures. The suggestions recommended in this study are to maximize Unity of Action, Communication, Division of Work and Discipline.

Keywords: Coordination, Forest and Land Fire Disaster Management

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul ” Koordinasi Antar Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya”. Judul ini di pilih karena penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar dinas dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan Kesatuan tindakan belum terlaksana secara maksimal, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan tindakan bersama dan pelaksanaan komunikasi belum terlaksana secara maksimal, sehingga Ketidakjelasan dalam saluran komunikasi, yang dapat menyebabkan informasi penting tidak sampai ke pihak yang tepat atau terlambat diterima. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antar dinas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, dilihat dari faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Sub. Bidang Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Kepala Bidang Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, Koordinator Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia Kabupaten Kubu Raya, dan Anggota Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena, sehingga penelitian ini berusaha untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas fenomena yang terjadi

dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor koordinasi yang efektif menurut Hasibuan (2006:88) yaitu : Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Antar Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya sudah terlaksana tetapi belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: pelaksanaan kesatuan tindakan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol dapat menyebabkan kebingungan tentang langkah-langkah yang harus diambil. Pelaksanaan komunikasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan sistem komunikasi yang tidak terintegrasi atau tidak memadai dapat menyebabkan informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu atau tidak akurat. Pelaksanaan pembagian kerja, belum dilakukan secara kontinyu dan terjadwal. Karena, kurangnya kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Pelaksanaan disiplin, belum berjalan maksimal, karena penegakan disiplin yang tidak konsisten atau tidak tegas yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur,

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran-saran sebagai berikut untuk memaksimalkan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur, kurangnya koordinasi, pembagian tugas

yang tidak jelas, keterbatasan sumber daya, Perlu perbaikan dalam komunikasi, dokumentasi, perencanaan sumber daya, latihan, serta penerapan dan penegakan prosedur yang konsisten untuk memastikan bahwa tindakan di lapangan seragam dan efektif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : JESSEE OMEGA SABATTILAT

Nomor Mahasiswa : E1011161070

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2024

Yang membuat Pernyataan



JESSEE OMEGA SABATTILAT

NIM.E1011161070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

In the name of Jesus Chirst

” Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk

Tuhan dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3:23)

” Karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua saya yang sangat saya Kasihi, terutama ibu saya Endang dan Bapak saya Oloan Sabattilat, yang selalu mendoakan dan memberi banyak motivasi kepada saya baik moril maupun materiil.

Serta Abang dan Adik saya yang terkasih, Ogi Imanuuel Sabattilat dan Lucky Gunandar Sabattilat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Koordinasi antar Dinas Terkait dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya”.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus di penuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang di capai melalui skripsi baru ini merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Rasidar, SE, M.Si. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi serta memberikan masukan selama penulis melakukan bimbingan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian hingga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dr. Sri Maryuni, M.Si, selaku Dosen Penguji Utama dan Dra. Kartika Ningtias, M.Si, selaku Dosen Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan sehingga memudahkan penulis dalam memperbaiki penulisan Skripsi.
4. Dr. Arifin M.AB. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang berperan sebagai wali bagi penulis yang memberikan semangat kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya beserta staf yang telah banyak memberikan informasi
7. Teman-teman Angkatan 2016, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Koordinasi antar Dinas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya.

Pontianak, Juli 2023
Penulis

JESSE OMEGA SABATTILAT
NIM.E1032191006

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract	ii
Ringkasan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian	vi
Motto dan Persembahaan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	11
1.3. Fokus Penelitian	12
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori	14
2.1.1 Manajemen	14
2.1.2 Koordinasi	15
2.1.3 Koordinasi Efektif	25
2.1.4 Indikator Koordinasi	32
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	33
2.3 Kerangka Pikir	35
3.7 Pertanyaan Peneliti	37

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3.1 Lokasi	40
3.3.2 Waktu	40
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	41
3.4.1 Subjek Penelitian	41
3.4.2 Objek Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Alat Pengumpulan Data	42

3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Teknik Keabsahan Data	44

BAB IV. GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya	47
4.1.1 Kedudukan	47
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.1.3 Rencana Strategis	48
4.1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	50
4.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya	57
4.2.1 Kedudukan	57
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	58
4.2.3 Rencana Strategis	59
4.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	61
4.3 Kelompok Kerja Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kubu Raya	67

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	69
5.2. Pembahasan.....	70
5.2.1 Kesatuan Tindakan	71
5.2.2 Komunikasi	76
5.2.3 Pembagian Kerja.....	83
5.2.4 Disiplin.....	86

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	99
6.2 Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tahun 2016 s/d 2018	7
1.2	Data 10 Daerah dengan Indeks Standar Udara (ISPU) Tertinggi Di Indonesia Per 28 Juli 2024	8
3.1	Waktu Penelitian	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	38
4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	52
4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.....	63
4.3 Struktur Tim Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kubu Raya	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koordinasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik kegiatan fisik maupun rohaniah. Koordinasi penting dalam organisasi-organisasi yang kompleks, karena disitu terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh orang banyak dalam banyak bagian. Kebutuhan akan organisasi timbul apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan tugas. Ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang efektif apabila kegiatan tersebut dikoordinasikan. Koordinasi secara normative berkaitan erat dengan proses kerjasama dalam pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dimana keberhasilan masing-masing pihak sangat didukung oleh satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal.

Pelaksanaan koordinasi diharapkan dapat mengarah kepada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Hakikatnya koordinasi adalah perwujudan dari usaha kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja(unit) dalam melakukan kegiatan, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan actor organisasi kearah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi akan bergerak sesuai dengan kepentingannya

namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing actor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian halnya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, pada dasarnya memerlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang mana pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara terencana, dari bawah hingga pengambilan keputusan, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengingat kejadian bencana mengingat kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas wilayah dari dampak bencana. Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau bencana lainnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko dari dampak bencananya. Koordinasi diperlukan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan pemerintah, maupun masyarakat.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kubu Raya sebagai perwakilan tingkat Kabupaten di wilayah Kubu Raya, dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya yang luasnya mencapai 6.985,24 km². Wilayahnya di bagi menjadi 9 kecamatan jika ditangani beberapa dinas maka masalah-masalah pekerjaan rumah tangga mustahil akan terselesaikan secara efektif, maka dari ini dibutuhkan kerjasama dalam setiap dinas dalam fungsi

dan tugasnya dalam bagian masing-masing yang saling berkoordinasi antar dinas yang ada di seluruh kabupaten Kubu Raya dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan tujuan bersama. Mengingat luas dan pentingnya tugas tersebut maka diperlukan koordinasi baik secara vertical, sebagai upaya penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawab. Maupun secara horizontal sebagai upaya penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam Instruksi Presiden (Inpres) untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, melibatkan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
8. Menteri Agama
9. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10. Menteri Sosial
11. Menteri Komunikasi dan Informatika

12. Menteri Badan Usaha Milik Negara
13. Menteri Dalam Negeri
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertahanan Nasional
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16. Menteri Keuangan
17. Menteri Luar Negeri
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19. Jaksa Agung Republik Indonesia
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
22. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
23. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
24. Para Gubernur
25. Para Bupati/ Walikota, dan
26. Instansi yang dianggap perlu

Untuk menindak lanjuti Inpres dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup dimana kedua dinas tersebut di bantu oleh TNI, POLRI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat Peduli Api (MPA), Pemadam kebakaran (Damkar) Swasta dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Menurut Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Permerintah (2011:35) pembagian kerja

dalam koordinasi antar dinas dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan model pola “fungsional” atau disesuaikan dengan fungsional dinas masing-masing. koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antara Lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan fungsi pekerjaan dan searah dan membentuk Brigade. Brigade menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah satuan angkatan bersenjata dalam militer resimen, merupakan dari divisi. Brigade dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah Unit Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Alam dan Tim Komando Satuan Tugas (Kosatgas) Karhutla, dalam koordinasi pembagian kerja penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Adapun teknis pola dalam penanggulangan dalam melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menurut pedoman pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dengan pola sebagai berikut, yang terdiri dari:

1. Pencegahan

Pencegahan dilakukan melalui pemantauan titik panas dan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar oleh brigade kabupaten/kota. Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar oleh brigade kabupaten/kota kepada pekebun dan kelompok tani peduli api dengan metode kelas diikuti dengan simulasi dan demplot/penyuluhan pertanian dengan percontohan pembukaan lahan tanpa

bakar secara terus menerus. Materi pembukaan lahan tanpa bakar dan memanfaatkan limbah pembukaan lahan tanpa bakar pada area perkebunan. Pelaksanaan pencegahan juga dilakukan oleh brigade dengan pekebun melalui pemberian bantuan bahan dan peralatan agar tidak membuka lahan dengan cara pembakaran.

2. Pemadaman

Pemadaman kebakaran terbagi atas 3 tingkatan, yaitu:

1. Kebakaran awal, yaitu kebakaran yang dapat dipadamkan dalam 3 hari. Dilaksanakan oleh brigade kabupaten/kota dengan melibatkan kelompok tani peduli api dan unit pemadam kebakaran perusahaan perkebunan disekitar lokasi kebakaran.
2. Kebakaran tingkat lanjut, yaitu kebakaran yang dapat dipadamkan dalam 4-7 hari. Dilakukan oleh brigade kabupaten/kota dengan melibatkan kelompok peduli api, unit pemadam kebakaran perusahaan perkebunan di provinsi tersebut dan unit pemadam kebakaran lainnya.
3. Kebakaran tingkat luar biasa, yaitu kebakaran yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu diatas 7 hari, dengan melibatkan brigade provinsi, brigade kabupaten/kota, kelompok tani peduli api unit pemadam kebakaran perusahaan perkebunan, dan unit pemadam kebakaran lainnya.

3. Penanganan Pasca Bencana

Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh pekebun, dinas kabupaten/kota, dinas provinsi dan kementrian pertanian melalui kegiatan rehabilitas lahan dan rehabilitas tanaman.

Ada beberapa cara dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan seperti yang tertulis dalam PERDA Kab. Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu:

1. Pencegahan dilakukan dengan cara selalu mengontrol kondisi lahan terutama pada saat musim kemarau.
2. Penanggulangan di lakukan dengan cara membentuk sector pemadam kebakaran di setiap kecamatan.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu raya luas area hutan dan lahan yang terbakar dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data luas Area Kebakaran Hutan di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2018 s/d 2023

Tahun	Luas Area Yang Terbakar (Ha)	Luas Area yang Dipadamkan (Ha)
2018	442,5	186,1
2019	74,00	49,3
2020	124,0	117,2
2021	132,0	86,5
2022	189,3	142,6
2023	235,8	198,7

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Berdasarkan Tabl 1.1 menunjukkan bahwa data awal luas area kebakaran hutan di kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018-2023 sempat mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali. hal ini menuntut tanggung jawab dalam tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana. Mengingat Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani masalah kehutanan tentu memiliki peran aktif dalam menjaga keutuhan hutan. Sedangkan BPBD memiliki fungsi sebagai badan yang menangani masalah bencana. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan koordinasi antar instansi belum sepenuhnya optimal terbukti pada tahun 2023 luas area kebakaran hutan mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai 10 Daerah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Tertinggi di Indonesia per 28 Juli 2024 Pukul 16.00 WIB dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Data 10 Daerah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Tertinggi
di Indonesia per 28 Juli 2024

No	Provinsi	Indeks kualitas udara
1	Kalimantan Barat	159
2	Jawa Barat	140
3	Jawa Timur	139
4	Banten	120
5	DKI Jakarta	105
6	Riau	95
7	Bengkulu	93
8	Kepulauan Riau	88
9	Jawa Tengah	87
10	Jambi	68

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024,

Berdasarkan Tabl 1.2 menunjukkan bahwa Kualitas Udara di Kalimantan Barat sore ini terburuk di Indonesia. Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (28/7/2024) pukul 16.00 WIB terungkap bahwa indeks kualitas

udara di Kalimantan Barat sebesar 159. Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, ISPU merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan ISPU berdasarkan hasil pengukuran tujuh parameter pencemar udara yakni PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO, O₃, dan HC. Pengukuran parameter pencemar udara tersebar di 72 stasiun di berbagai daerah.

ISPU pada rentang 0-50 memiliki kualitas udara baik, rentang 51-100 berarti kualitas udara sedang, dan rentang 101-200 kualitas udara tidak sehat yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya, kualitas udara sangat tidak sehat pada rentang 201-300 dapat meningkatkan risiko kesehatan pada kelompok sensitif. Sementara, kualitas udara berbahaya pada rentang lebih dari 300 dapat merugikan kesehatan secara serius dan perlu penanganan cepat. Di bawah Kalimantan Barat, ada Jawa Barat yang menempati posisi kedua terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara 140. dan Indeks kualitas udara adalah Provinsi Jambi, yaitu 68.

Kebakaran hutan dan lahan telah berdampak buruk baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi dan ekologi. Dampak langsung dari kebakaran hutan terhadap lingkungan atmosfer adalah berupa kabut asap yang menghalangi daya visibilitas (jarak pandang) terutama untuk penerbangan dan transportasi laut. Dampak tidak langsung adalah berupa emisi gas CO₂, NO_x, dan NH₄ yang masing-masing memiliki *life time* yang berbeda. Gas-gas tersebut akan mengapung di atmosfer sebagai gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan

bumi, perubahan iklim, pencairan salju, dan kenaikan muka air laut. Salah satu dampak yang sangat berbahaya adalah terganggunya kesehatan masyarakat karena terpapar polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya disebabkan karena berbagai permasalahan yaitu dimana DLH dan BPBD Kabupaten Kubu Raya memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, yang dapat mengarah pada konflik dalam merumuskan dan melaksanakan rencana tindakan bersama. Tanpa rencana aksi yang terkoordinasi dengan baik, tindakan dari masing-masing dinas terkait dapat menjadi tidak konsisten atau tumpang tindih. Selain itu Alokasi sumber daya yang tidak memadai atau tidak merata dapat menghambat pelaksanaan rencana secara efektif. Kemudian komunikasi yang tidak jelas atau tidak teratur antara DLH dan BPBD Kabupaten Kubu Raya dapat mengakibatkan informasi penting tidak sampai atau terlambat diterima sehingga menyebabkan lambatnya penanganan mengenai masalah kebakaran. Ketidakmampuan untuk berbagi informasi secara terbuka dan transparan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan keputusan yang tidak berdasarkan data yang lengkap. Selain itu, masalah teknis dengan *platform* komunikasi atau perangkat yang digunakan dapat menghambat aliran informasi yang cepat dan efektif.

Pembagian tugas yang tidak merata atau tidak adil menyebabkan beberapa pihak kewalahan sementara yang lain tidak terlibat secara maksimal. Selain itu, adanya keterbatasan dalam keterampilan atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing dinas terkait dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

Ketiadaan mekanisme penegakan disiplin yang efektif dapat menyebabkan pelanggaran prosedur dan standar yang diabaikan. Selain itu, keterbatasan dalam pengawasan dan monitoring dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikasi permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Koordinasi antar dinas terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi, meliputi:

1. Adanya perbedaan tujuan antar dinas terkait.
2. Keterlambatan dalam penyampaian informasi.
3. Tidak jelas mengenai peran dan tanggung jawab.
4. Tidak adanya pengawasan mengenai SOP yang telah ditetapkan.

1.3 Fokus Penelitian

Moleong (2011:94) menyatakan bahwa penentuan fokus penelitian memiliki dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitas sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini pada: faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Koordinasi antar Dinas Lingkungan

Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antar dinas terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya.?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antar dinas terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, dilihat dari factor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya Manajemen Publik tentang pelaksanaan koordinasi. Sehingga penelitian ini dapat memberi masukan kepada instansi dan seluruh *stakeholder* terkait.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam mengamati fenomena sosial, dan

keahlian ilmu pengetahuan lain selama mengikuti program studi Ilmu Administrasi Publik. Manfaat penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi tambahan untuk dinas terkait dan seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh pembaca pada penelitian selanjutnya.